

MERETAS HUBUNGAN MAYORITAS-MINORITAS DALAM PERSPEKTIF NILAI BUGIS

Syarifuddin Latif

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone
(syarifuddin.latif@yahoo.co.id)

Abstrak

Kenaikan konflik karena kesenjangan antara mayoritas dan minoritas dalam strata sosial semakin berkembang baru-baru ini. Konflik, tentu saja, adalah masalah yang serius dan harus diatasi karena dapat merusak kerukunan hidup. Untuk meminimalkan konflik, baik mayoritas dan minoritas harus diselenggarakan dengan menggunakan beberapa upaya. Salah satu upaya yang dapat ditawarkan adalah kearifan lokal dari bugis yang disebut paseng dan pangadereng. Paseng terdiri dari ADA tongeng, sipakatau Sipakalebbi, Dan mappesona ri dewata seuwwae. Sementara itu pangadereng terdiri dari adek, rapang, Bicara, warik, Dan sarak, kearifan lokal bugis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi effectifely dalam upaya membangun hubungan harmonis antara mayoritas dan minoritas.

The raise of conflicts due to the gap between the majority and the minority in the social stratum is getting more and more progressing recently. The conflicts, of course, are a serious problem that must be overcome because they can corrupt the harmony of life. To minimize the conflicts, both the majority and the minority must be harmonized by using some efforts. One effort that can be offered is local wisdom of the bugis that is called paseng and pangadereng. Paseng consists of ada tongeng, sipakatau sipakalebbi, dan mappesona ri dewata seuwwae. Meanwhile pangadereng consists of adek, rapang, bicara, warik, dan sarak, local wisdom of the bugis is expected to contribute effectifely in the effort to build a harmony relationship between the majority and the minority.

Kata Kunci: mayoritas-minoritas, Bugis, harmoni, konflik

A. Pendahuluan

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak hanya hidup di ruang hampa dari berbagai interaksi sosial, menuntut adanya interaksi yang intensif dengan manusia yang lainnya. Adanya interaksi tersebut tentunya, disadari atau tidak disadari, akan menghadirkan benturan-benturan kepentingan ataupun sekedar penguatan identitas suatu komunitas atas komunitas yang lainnya. Implikasinya, kelompok yang berhasil dalam proses penguatan identitas tersebut karena adanya dukungan sosial, baik dengan pertimbangan kuantitas ataupun kualitas, cenderung akan memproklamirkan diri sebagai kelompok mayoritas yang disadari atau tidak disadari akan memunculkan pula kelompok minoritas sebagai kelompok yang umumnya dianggap sebagai komunitas sosial kelas dua yang berada di bawah pengaruh kelompok mayoritas dalam berbagai dimensi kehidupan sosial meski biasanya mengabaikan aspek-aspek produktivitas kelompok minoritas.

Parahnya, pengaruh kelompok mayoritas terhadap minoritas biasanya sudah menyentuh hal-hal yang sangat prinsip kelompok yang sudah seyogyanya menjadi hak asasi bagi komunitas yang dikategorikan sebagai kelompok minoritas. Dalam hal keyakinan beragama misalnya, apa yang diyakini sebagai kebenaran oleh kelompok mayoritas sebagai suatu keyakinan beragama yang normatif dan profan, harus dihormati oleh kelompok minoritas sebagai suatu kebenaran yang tidak terbantahkan. Sebaliknya, apabila kelompok minoritas memiliki keyakinan beragama yang berbeda dengan kelompok mayoritas, maka mereka dianggap sebagai kelompok masyarakat yang telah melawan keyakinan arus utama sehingga berbagai tindakan provokatif dan refresif sering mereka peroleh dari kelompok mayoritas seperti pelabelan sebagai kelompok sesat, diskriminasi dalam hal akses pada pelayanan publik, pemasungan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan, bahkan sampai pada tindakan-tindakan brutal seperti pembakaran rumah ibadah, penyerangan dan pembantaian terhadap komunitas tertentu yang semua itu merupakan suatu tindakan yang tidak pernah dibenarkan oleh agama dan keyakinan apapun. Padahal kebenaran hanyalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang selain-Nya di wilayah konkret adalah fana sehingga kebenaran bisa beralih wajah dalam bentuk realitas mistis, teologis, dan sosial yang beraneka rupa. Kebenaran di wilayah konkret adalah kontrak sosial, sedangkan

kebenaran di wilayah abstrak hanyalah milik Tuhan. Konsekuensinya, klaim-klaim kebenaran yang muncul pada wilayah konkrit yang tentunya berafiliasi dengan kepentingan individu dan kelompok bisa saja disisipi dengan kebohongan, tipu daya, rekayasa, manipulasi, intimidasi dan sebagainya.

Pada sisi lain, kelompok minoritas yang umumnya mendapatkan tindakan-tindakan provokatif dan refresif dari kelompok mayoritas biasanya pada mulanya mau membuka diri berdialog dan bekerjasama akan tetapi manakala tindakan-tindakan provokatif dan refresif tidak juga berhenti, mereka mulai membangun stereotip bahwa kelompok mayoritas adalah kelompok masyarakat yang sudah tidak mengenal lagi etika sosial bermasyarakat karena sudah lebih memilih penyelesaian persoalan dengan menggunakan prinsip hukum rimba "*siapa kuat dia berkuasa, siapa lemah dia tertindas*", kemudian mereka lebih memilih menarik diri dari pergaulan sosial dengan segala kebencian yang belum bisa terbalaskan. Kristal-kristal kebencian tersebut semakin lama semakin membesar yang bisa diwariskan turun temurun pada generasi mereka berikutnya dengan diikuti penggalangan kekuatan, baik kuantitas ataupun kualitas, untuk mematahkan dominasi kelompok mayoritas dengan segala macam cara yang bisa diibaratkan seperti bom waktu yang sewaktu-waktu bisa diledakkan apabila memungkinkan. Suatu hal yang patut direnungkan bahwa kelompok-kelompok minoritas tersebut apabila mereka terus menerus mendapatkan tindakan-tindakan provokatif dan refresif dari kelompok mayoritas maka mereka bisa menjelma menjadi kelompok yang besar, karena akan timbul perasaan senasib di antara mereka sebagai komunitas tertindas yang kemungkinan akan menyatukan mereka untuk melakukan perlawanan atas segala bentuk penindasan dan ketidakadilan sosial yang mereka alami selama ini.

Adanya kesenjangan jarak antara kelompok mayoritas dan minoritas ini tentunya akan menjadi suatu sandungan tersendiri demi terciptanya kestabilan pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, dan berkeyakinan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk meretas mayoritas dan minoritas sebagai modal hidup bersama perlu digalakkan melalui berbagai perspektif yang salah satunya adalah

dengan perspektif nilai bugis¹ yaitu *paseng* dan *pangadereng* yang akan menjadi fokus pembahasan makalah ini.

B. Urgensi Reposisi Sistem Keberagaman dalam Meretas Mayoritas-Minoritas

Gambaran umum tentang pergulatan kelompok mayoritas dan minoritas seperti yang tergambar pada bagian pendahuluan di atas setidaknya-tidaknya sudah bisa memberikan isyarat bahwa ada suatu potensi disharmonisasi hubungan di antara keduanya. Isyarat tersebut semakin jelas manakala dibawa pada tataran panggung kehidupan yang empiris praktis dengan segala pertarungan kepentingan di dalamnya. Tentu saja, kelompok mayoritas dengan bebasnya melakukan hegemoni terhadap kelompok minoritas meski dengan malu-malu kucing mereka mencari-cari justifikasi atas tindakan hegemoni tersebut sambil berteriak lantang atas nama agama.

Pembakaran rumah ibadah serta teror yang ditujukan kepada kelompok agama atau penganut kepercayaan tertentu merupakan realitas empiris praktis yang sudah seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Ajie Prasetyo dan Nofrianus Barens menyatakan bahwa kasus diskriminasi dan intimidasi terhadap kebebasan beragama semakin meningkat dalam kurung waktu lima tahun terakhir.² Salah satu kasus yang menelan korban jiwa adalah

¹ Bugis adalah kelompok etnis yang menempati bagian tengah dan selatan Jazirah Sulawesi Selatan sebagai daerah asal dan tempat menetapnya. Menurut Lontarak Attoriolongge ri Pammana (buku Sejarah Pammana), bahwa pada mulanya suku Bugis masih merupakan bagian dari suku To Luwu. Di bawah pimpinan La Sattupugik, sekelompok suku itu pindah ke daerah Cenrana (Bone sekarang) lalu sebagian pindah ke daerah Pammana (Wajo sekarang) Daerah Bone dinamai Cina ri lauk dan daerah Wajo dinamai Cina ri aja. La Sattupugik yang menjadi raja pertama dengan gelar Datunna atau Opunna Cina dan memberi gelar rakyatnya orang-orang Ugik (Bugis) sesuai dengan akhir namanya.. Putri La Sattupugik bernama We Cudaik Daeng Risompa dikawini oleh Sawerigading (Lamaddukelleng To Appanyompa Opunna Warek putra sulung Batara Lattuk Raja Luwuk Ii). Kemudian dari Cina, sebagian suku itu menyebar ke daerah-daerah yang sekarang didiami oleh suku Bugis. Asal daerah mereka dipecah lagi menjadi kerajaan-kerajaan, seperti Bone, Wajo, Pammana, Timurung, Sailong, Mampu dan lain-lain. Lihat Andi Zainal Abidin, *Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang; Hasanuddin University Press, 1999), h.56.

² Ajie Prasetyo dan Nofrianus Barens, *Praktik Anti-Diskriminasi masih Jauh dari Kenyataan*, <http://berita.liputan6.com>. (Diunduh pada Senin, 10 Oktober 2011)

kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, Febuari silam.

Hal yang patut dipertanyakan adalah bagaimana efektivitas agama dalam menghadirkan kedamaian dalam kehidupan umat beragama. Seiring dengan semakin meningkatnya disharmonisasi kelompok mayoritas dan minoritas dalam kehidupan beragama, muncul kesan bahwa seolah-olah petuah-petuah keagamaan yang disampaikan di rumah-rumah ibadah bukan lagi untaian panggilan suci untuk menyebarkan kedamaian ke seluruh penjuru alam semesta tapi telah direduksi fungsinya menjadi penanaman dogma hitam putih dimana hanya kelompoknya berhak atas wilayah kebenaran sedangkan kelompok yang lainnya adalah mereka yang pantas divonis sesat sehingga halal untuk diperangi bahkan dibinasakan kalau perlu. Realitas ini kelihatannya bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Max Weber yang menyatakan bahwa manusia pada kenyataannya selalu berhadapan dengan ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan dalam kehidupannya. Kehadiran agama ibarat mata air penyejuk yang menyegarkan dahaga manusia atas ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan tersebut.³ Sementara dalam kaitannya dengan posisi agama sebagai sumber semangat kebersamaan, Kingsley Davis, seorang penganut teori fungsional, menyatakan bahwa berbagai obyek yang disakralkan, termasuk agama, bukan sekedar menyimboli masyarakat tertentu tapi menyimboli dunia yang tidak terlihat (*invisible world*) yang memberi pelaku sumber dan pembenaran terakhir bagi tujuan kelompok yaitu tujuan-tujuan bersama dengan anggota kelompok lain dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Dalam menjelaskan fungsi agama dalam kehidupan umat manusia, Thomas F. O’dea merincinya menjadi enam fungsi sebagai berikut:

1. Agama mendasarkan perhatiannya pada sesuatu di luar jangkauan manusia yang melibatkan takdir dan kesejahteraan dimana agama memberikan dukungan dan rekonsiliasi

³ Talcott Parsons, *Essays in Sociological Theory* (Glencoe: The Free Press, 1985), h. 208-209.

⁴ Kingsley Davis, *Human Society* (New York: MacMillan Co, 1948), h. 529.

manakala manusia menghadapi ketidakpastian dan ketidakberdayaan.

2. Agama menawarkan suatu hubungan transendental melalui ibadah atau pemujaan yang dapat menghadirkan dasar emosional munculnya rasa aman dan pengakuan identitas di tengah ketidakpastian dan ketidakberdayaan.
3. Agama mensucikan norma dan nilai masyarakat yang telah terbentuk sehingga agama dapat mem perkuat legitimasi pembagian fungsi, fasilitas, dan ganjaran yang merupakan ciri khas suatu masyarakat.
4. Agama memberikan standar nilai dalam arti bahwa norma-norma yang telah terlembagakan dapat dikaji ulang secara kritis dengan mengakomodir dinamika kehidupan bermasyarakat.
5. Agama melakukan fungsi identitas yang penting sehingga individu-individu dalam konteks kehidupan bermasyarakat bisa memiliki pemahaman diri dan batasan diri.
6. Agama mengontrol pertumbuhan dan kedewasaan individu dimana pertumbuhan dan kedewasaan mereka menghadapi rangkaian karakteristik pada berbagai tingkatan usia dari lahir sampai mati.⁵

Dari uraian di atas, terlihat bahwa kehadiran agama merupakan suatu isyarat akan hadirnya kebersamaan dan kedamaian di tengah kegelisahan manusia dalam ketidakpastian dan ketidakberdayaan. Adanya riak-riak yang muncul di tengah kehidupan bermasyarakat, khususnya yang biasa dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, mengisyaratkan perlunya ada pengkajian ulang tentang bagaimana pemahaman manusia tentang agama yang begitu rentang ditunggangi oleh berbagai kepentingan individu dan kelompok yang secara otomatis juga berpengaruh terhadap sistem keberagamaan yang diterapkan. Dalam upaya meretas hubungan mayoritas-minoritas tersebut, perlu ada dilakukan pendekatan emosional mengingat persoalan keberagamaan merupakan persoalan yang cukup sensitif yang salah satunya melalui nilai-nilai lokal dimana

⁵ Thomas F. O’dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal* (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada kerjasama dengan Yayasan Solidaritas Gadjah Mada, 1995), h. 26-29.

makalah ini mencoba untuk mengungkapkannya melalui perspektif nilai bugis.

C. Meretas Hubungan Mayoritas-Minoritas sebagai Modal Hidup Bersama dalam Perspektif Nilai Bugis

Sebagai salah satu suku dengan komunitas yang besar, suku bugis dikenal sebagai suku yang memiliki falsafah hidup yang sangat kuat dalam mengarungi kerasnya kehidupan. Cerita tentang bagaimana nenek moyang bugis yang dikenal sebagai pelaut ulung yang dengan gagah berani menaklukkan tinggi dan derasnya gelombang samudera luas adalah salah satu realitas historis yang tidak terbantahkan. Dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, nenek moyang bugis memiliki nilai yang menjadi inspirator penggerak etos kerja mereka yaitu *paseng dan pangadereng*.

1. Paseng

Paseng dapat diartikan sebagai suatu pesan atau amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Menjaga *paseng* merupakan suatu pertarungan harga diri dan kehormatan karena bisa menjadi garis pembatas antara kemuliaan dan kehinaan seseorang dalam hidupnya. Secara rinci, *paseng* dapat dijabarkan menjadi lima bagian yaitu:

a. Lempu

Lempu adalah salah satu *paseng* dalam nilai bugis yang bisa bermakna kejujuran. Menurut Albert Hendra Wijaya, kejujuran jika diartikan secara baku adalah "mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran".⁶ Hal ini mengisyaratkan bahwa seseorang baru bisa dikatakan jujur apabila ia mampu untuk berkata sesuai dengan kenyataan. Antitesanya adalah seseorang yang berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan merupakan orang yang tidak jujur yang dalam pandangan Islam bisa dikatakan sebagai orang munafik.

⁶ Albert Hendra Wijaya, Kejujuran, <http://indonesia.siutao.com>. (diunduh pada Senin, 10 Oktober 2011)

Dalam perspektif nilai bugis, kejujuran banyak digambarkan dalam petuah-petuah orang bijak yang dikenal dengan silasa. Dalam kumpulan Andi Palloge Petta Nabba dikatakan “*Sabbinna lempu’e limai iyanaritu: 1) narekko salai, naengngangi asalanna, 2) narekko rionroi sala, naddampengengi tau ripassalanna 3) narekko risanresiwi, de’ napacekoyyang, 4) narekko rirennuangi, de’ napabellieyyang, 5) narekko majjanciwi, narupaiwi jancinna.*”⁷ Ungkapan ini menggambarkan bahwa kalau seseorang sudah bisa memahami kesalahannya, maka sekurang-kurangnya ia telah memiliki kejujuran dalam menilai diri sendiri karena seringkali kesalahan orang lain nampak lebih jelas daripada kesalahan diri sendiri. Maaf tidak akan pernah terucap pada lidah orang yang selalu menimbang suatu kesalahan berdasarkan kepentingan individu dan kelompoknya. Hanya orang jujur yang bisa memahami pentingnya nilai amanat yang diberikan padanya dan bertolak dari asumsi tersebut, orang jujur menganggap penipuan sebagai suatu hal yang bertentangan dengan paham kebenaran yang dianutnya. Bagi orang jujur, menepati janji adalah jaminan harga diri yang patut ditepati.

Dalam lontara Andi Makkaraka Ranreng Bettempola dikatakan “*naiyya riyasenge lempu’ tellunrupai iyanaritu 1) lempu’na Puwange ri atanna, naiyya lempu’na Puwange ri atanna, tennawale’i ja’ gau madecenna atanna ritennaulle, 2) lempu’na atae ri Puwanna, naiyya lempu’na atae ri Puwanna naggangkangulleyyangi napajajiyangi passurona Puwanna iyya pura risurowangengi, 3) malaengi akkalarudduseng alena bettuwanna malangi rapang alena, mecennippi nyawamu molai mupolai tauwwe ri sesena gau madecenge.*”⁸ Ungkapan ini menggambarkan bahwa kejujuran dapat menjelma dalam tiga hal yaitu keadilan, kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab serta refleksi pada diri sendiri dalam tiap perkataan dan perbuatan khususnya dalam hal kebaikan.

⁷ A. Hasan Machmud, *Silasa: Kumpulan Petuah Bugis Makassar* (ttp.: Bakti Centra Baru, t.th), h. 16.

⁸ *Ibid.*

Dalam kaitannya dengan upaya meretas kelompok mayoritas dan minoritas, makna yang tersirat pada nilai *lempu'* (kejujuran) bisa diterapkan mengingat potensi konflik biasanya muncul apabila masing-masing hanya menimbang ukuran benar dan salah berdasarkan kacamata kepentingan kelompok masing-masing. Nilai *lempu'* mengisyaratkan bahwa perlu ada refleksi diri sendiri dalam mengukur suatu tindakan yang akan dilakukan terhadap orang lain. Penderitaan yang dirasakan manakala kita disakiti adalah rasa sakit yang juga dirasakan oleh orang lain apabila tindakan-tindakan agresif dilakukan pada kelompok mereka.

b. *Getteng*

Getteng adalah salah satu *paseng* dalam nilai bugis yang bisa bermakna keteguhan, ketegasan, serta kesetiaan pada keyakinan. Keteguhan hati adalah sifat penting seorang beriman. Orang beriman tidak pernah kehilangan keteguhan, ketegasan, serta kesetiaan pada keyakinan.

Dalam kumpulan Andi Pabarangi, *To Maccae ri Luwu* yang biasa disebut *To Ciung* mengatakan “*eppa’i gau’na gettenge iyanaritu: 1) tessalai’e janci 2) tessorosi ulu ada, 3) telluka anu pura, teppinra assituruseng, 4) mabbicarai naparapi, mabbinru’i tepupi napaja*”⁹ Ungkapan ini menggambarkan bahwa orang yang memiliki keteguhan, ketegasan, serta kesetiaan pada keyakinan dapat menghargai tiga hal yaitu harga diri yang tercermin dalam hal menghargai janji dan menghormati ikrar, keyakinan yang tercermin dalam watak yang tidak mau berubah pada keputusan yang telah disepakati, serta tanggung jawab yang tercermin dalam konsistensi dalam menyelesaikan suatu urusan.

Dalam kaitannya dengan upaya meretas kelompok mayoritas dan minoritas, makna yang tersirat pada nilai *getteng* bisa diterapkan mengingat nilai kesetiaan pada keyakinan yang tersirat pada *getteng*

⁹ *Ibid.*, h. 23.

bisa menjadi inspirator munculnya semangat kebersamaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Semua ajaran agama memiliki nilai universal kebersamaan sehingga perpecahan yang diakibatkan oleh dimensi mayoritas dan minoritas adalah musuh semua agama yang bisa diatasi dengan mengimplementasikan *getteng* dalam meretas mayoritas dan minoritas dalam kehidupan beragama.

c. Ada tongeng

Ada tongeng adalah salah satu *paseng* dalam nilai bugis yang bermakna satu kata dengan perbuatan. Dalam kumpulan Andi Macca Amirullah, dikatakan “*pasiceppe’i lilamu nabatelamu*”¹⁰ Ungkapan ini menggambarkan bahwa *ada tongeng* memiliki peran sentral dalam mengokohkan harga seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Harga diri seseorang ditentukan oleh caranya menyelaraskan ucapan dan perbuatannya. Semakin selaras antara kata dan perbuatannya, maka semakin tinggi harga dirinya, sementara semakin berbeda antara kata dan perbuatannya, maka semakin rendah harga dirinya.

Dalam kaitannya dengan upaya meretas kelompok mayoritas dan minoritas, nilai yang terkandung pada *paseng ada tongeng* bisa diaplikasikan mengingat berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak dalam meredam potensi konflik yang di ntaranya melalui forum-forum dialog yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk meretas kelompok mayoritas dan minoritas. Kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh para pemegang kebijakan tersebut tentunya telah menjadi konsensus bersama sampai pada masyarakat atau komunitas yang dipimpinnya. Sehingga dengan *paseng ada tongeng*, konsensus tersebut harus dijaga dan dihormati oleh semua pihak dengan menahan diri oleh berbagai kepentingan-kepentingan yang ingin merusak konsensus tersebut.

Sebagai kewaspadaan dalam menghadapi *ada salae* yang merupakan lawan *ada tongeng*, dalam kumpulan Achmad Musa disebutkan “*unga tabbae ri subue, narekko momponi essoe pajani*

¹⁰ *Ibid.*, h. 25.

baunna” Ungkapan ini menggambarkan bahwa seseorang hendaknya jangan langsung percaya atau menampakkan kegembiraan apabila mendengar bicara yang muluk-muluk sebab mungkin akan berubah apabila tujuannya telah tercapai. ¹¹*Ada salae* ini biasa muncul di tengah kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka mengganggu stabilitas kerukunan yang telah terikat oleh konsensus-konsensus tadi sehingga berpegang teguh pada *paseng ada tongeng* merupakan salah satu solusi alternatifnya.

d. *Sipakatau sipakalebbi*

Sipakatau sipakalebbi adalah salah satu *paseng* dalam nilai bugis yang bermakna saling menghormati (*mutual respect*). *Paseng sipakatau sipakalebbi* ini cukup populer di kalangan masyarakat bugis. Dalam kumpulan Andi Palloge Petta Nabba disebutkan “*tessisampoang uring-lowa’, tessisebbokeng pamuttu (tidak saling menutupkan belanga, tidak saling membocorkan periut).*”¹² Dalam kaitannya dengan upaya meretas kelompok mayoritas dan minoritas, ungkapan ini menggambarkan bahwa perlu ada semangat tolong menolong satu sama lain oleh seluruh komponen dalam kehidupan bermasyarakat yang digambarkan dengan tidak saling menutupkan belanga. Sementara itu, makna “tidak saling membocorkan belanga” bisa berarti saling menghormati satu sama lain tanpa ada keinginan buruk untuk merusak tatanan kehidupan kelompok yang lain. kehidupan saling asih, asah, dan asuh yang terefleksi dimana kelompok mayoritas melindungi yang minoritas serta sebaliknya kelompok minoritas menghormati yang mayoritas merupakan suatu nilai bugis yang terkandung dalam *paseng sipakatau sipakalebbi*.

Paseng sipakatau sipakalebbi bukanlah berarti suatu nilai bugis yang menempatkan pelakunya sebagai orang yang berada pada posisi satu tingkat di bawah orang yang dihormati. Bahkan sebaliknya,

¹¹ *Ibid.*, h. 26.

¹² *Ibid.*, h. 36.

menghormati orang dalam bingkai *sipakatau sipakalebbe* justru juga turut meninggikan kehormatan dan kemuliaan orang yang menghormati. Dalam kumpulan Haji Andi Ninnong dikatakan “*akka’i padammu rupa tau natanrereko (angkatlah sesamamu manusia supaya engkau juga ditunjang).*”¹³ Ungkapan ini menggambarkan bahwa kalau seseorang mengharapkan penghargaan dari orang lain, hendaknya ia mulai dengan menghargai orang lain terlebih dahulu. Penghargaan akan datang karena ada sesuatu yang patut dihargai, dan salah satu yang patut dihargai adalah menghormati dan menghargai orang lain.

e. Mappesona ri Dewata Seuwwae

Mappesona ri dewata seuwwae adalah salah satu *paseng* dalam nilai bugis yang bermakna berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini merupakan wujud kepasrahan diri seorang hamba pada Tuhannya. *Paseng mappesona ri dewata seuwwae* disampaikan oleh Pollipue Matinroe Ritanana dalam lontara Andi Makkaraka Ranreng Battempola yang mengatakan “*narekko engka kedo ri atimmu, itai siya riyolo’ cappa’na muinappa pegau’i. apa’ duwairitu kedona atie: seu’wani kedo marenni’i, maduanna kedo mawessa’i. narekko kedo merenni’i, madecengi ritu ripesiga-sigakiwi pagau’i sarekko ammengi napajajiwi Dewata’e deceng. Narekko kedo mawessa’i, ammatu-matuwangi kuwammengi tennapajajiwi Dewatae ja’ (andaikan ada terlintas dalam hatimu, tinjaulah dulu akibatnya baru dilaksanakan. Sebab dua macam gerak dari hati yaitu gerak kecil dan gerak besar. Kalau geraknya kecil, sebaiknya dipercepat pelaksanaannya semoga Tuhan merahmati dengan kebaikan. Kalau geraknya besar, perlambatkanlah, semoga Tuhan tidak menjadikannya sebagai keburukan)*”¹⁴ Gerak kecil yang tenang dalam hati merupakan simbol gerak hati ruhani yang dengan penuh pengharapan akan datangnya pertolongan Tuhan sementara gerak besar dalam hati merupakan simbol pergerakan hawa nafsu yang penuh dengan ambisi dan ketergesa-gesaan.

¹³ *Ibid.*, h. 37.

¹⁴ *Ibid.*, h. 1-2.

Dalam kaitannya dengan upaya meretas kelompok mayoritas dan minoritas, ungkapan ini menggambarkan bahwa manusia pada dasarnya merupakan duta (*khalifah*) Tuhan yang diamanahkan untuk membawa kemaslahatan di muka bumi. Hati nurani manusia merupakan titipan Tuhan yang memiliki kekuatan identifikasi dalam menangkap pancaran kebenaran dari-Nya sehingga suara hati perlu didengarkan. Secara fitrah, hati manusia cenderung pada nilai universal yang dianut oleh seluruh manusia seperti kedamaian, kesatuan, kebersamaan, dan semacamnya sehingga ukuran mayoritas minoritas yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh menjadi pemicu hilangnya dengung hati nurani yang suci sebaliknya ukuran mayoritas-minoritas tersebut menjadi suatu kekhasan yang semakin memperkaya dinamika kehidupan bermasyarakat dengan senantiasa menjadikan Tuhan sebagai landasan normatif semua aktivitas yang dilakukan.

2. Pangadereng

Pangadereng adalah sistem budaya dan sistem sosial yang dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah yang meliputi cara-cara seseorang bertingkah laku terhadap sesama manusia yang dapat mengakibatkan adanya gerak (dinamika) kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Pengertian ini mengisyaratkan bahwa *pangadereng* merupakan wujud kebudayaan yang hadir di tengah-tengah manusia untuk mengatur dan menjaga stabilitas kehidupan sosial bermasyarakat. Dalam naskah Latoa alinea 48-49, digambarkan bahwa *pangadereng* mencakup lima komponen yaitu *adek*, *rapang*, *bicara*, *warik*, serta *sarak*¹⁶

a. Adek

¹⁵ Naskah Latoa, alinea: 48, 49, dan 68 yang kutip dari Andi Rasdianah, *Integrasi Sistem Pangadereng (Adat) dengan Sistem Syariat sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa* (Disertasi; Yogyakarta: PPS IAIN Sunang Kalijaga, 1995), h. 137.

¹⁶ *Ibid.*, h. 137-138.

Adek (adat) adalah kebiasaan yang menjadi norma kesusilaan dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Andi Rasdiyanah, istilah tua di bugis tentang *adek* adalah *beccik* (alat pelurus)¹⁷, *jorik* (garis), *laleng* (jalan), *pabbatang* (penghalang), *petawu* (pematang sawah), serta *pura-onro* (ketepatan yang baku).¹⁸ *Adek* merupakan salah satu aspek *pangadereng* yang mengatur pelaksanaan aturan-aturan dalam kehidupan orang bugis. Implikasinya, *adek* menjadi tata aturan yang bersifat normatif yang menjadi pedoman orang bugis dalam menghadapi kehidupan sosial bermasyarakat.

Adek merupakan menifestasi aspek kebudayaan yang dapat berwujud nilai ideal berupa hukum adat yang disebut *singkerruang*, kelakuan-kelakuan yang disebut barangkauk, ataupun dalam bentuk fisik yang disebut *abbarangparangeng*¹⁹ Hal ini mengisyaratkan bahwa *adek* merupakan aspek *pangadereng* yang menjelma dalam berbagai aspek kehidupan sosial bermasyarakat orang bugis.

Dalam kaitannya dengan upaya meretas kelompok mayoritas dan minoritas, *adek* bisa menjadi acuan normatif yang mengatur kehidupan sosial bermasyarakat dimana aspek kewajiban dan hak setiap komponen masyarakat teratur secara terdistribusi secara seimbang dan adil. Dengan adanya *adek* yang berwujud nilai ideal berupa hukum adat yang disebut *singkerruang*, kelakuan-kelakuan yang disebut barangkauk, ataupun dalam bentuk fisik yang disebut

¹⁷ *Becci* merupakan istilah yang digunakan oleh orang Bugis sebelum munculnya kata '*adek*', dengan ungkapan yang sangat terkenal, yaitu: *Nareko makkompei beccie, masolanni lipue, legga welong panasae, massobbuni lempue, ritongengenni salea, ri pasalai tongengnge, si anre bale taue, sibalubalu, si-abbelli-belliang natuoni serri dapurengnge, ri-poppang palungengnge, risappiang pattapie, risellorang alue,..*(Bilamana becci kendor, (tidak dipatuhi), maka rusaklah negeri, tidak memutik pucuk nangka (kejujuran), bersembunyi kebenaran, dibenarkan yang salah, disalahkan yang benar, saling makan-memakanlah orang bagaikan ikan, saling jual-menjual, saling beli-membeli, dapur sudah ditumbuhi rumput-rumput, lesung ditelungkupkanlah, nira digantung, disangkutkkan alu. Lihat Mattulada, *Latoa Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, (Cet. II; Ujung Pandang, Hasanuddin University Press, 1995), h. 343.

¹⁸ Andi Rasdiyanah, *op. cit.*, h. 150.

¹⁹ *Ibid.*, h. 153.

abbarangparangeng yang dihormati dan dijunjung tinggi, maka akan terbentuk keharmonisan hidup antara kelompok mayoritas dan minoritas.

b. *Rapang* (Persamaan Hukum)

Menurut bahasa, *rapang* adalah contoh, umpama atau perumpamaan. Makna etimologi ini menunjukkan bahwa *rapang* sebagai salah satu *pangadereng* orang bugis bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan sehingga seseorang tidak bisa mengambil keputusan dalam *adek* sebelum mengambil perumpamaan pada kejadian yang serupa pada masa lalu. Implikasinya, seseorang tidak boleh mengambil landasan baru apabila sebelum itu telah pernah peristiwa yang sejenis dan terbukti bermanfaat. Oleh karena itu, Andi Rasdianah mengatakan bahwa *rapang* bisa berfungsi sebagai stabilitator yang menjaga konsistensi suatu nilai pada waktu lampau untuk tetap eksis sampai sekarang, bahan perbandingan yang membandingkan suatu ketetapan di masa lampau yang pernah terjadi atau semacam yurispundensi. Hal seperti ini umumnya dilakukan apabila ada suatu kejadian yang belum termaktub dalam *adek*, maka *rapang* bisa menjalankan fungsi kiyas, serta alat pelindung yang berwujud *pemmali-pemmali* (pantangan) atau *pappaseng* (pesan-pesan) yang berfungsi melindungi hak-hak individu atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

Dalam kaitannya dengan upaya meretas kelompok mayoritas dan minoritas, nilai *rapang* sebagai alat pelindung yang berwujud *pemmali-pemmali* (pantangan) atau *pappaseng* (pesan-pesan) bisa menawarkan suatu alternatif teladan yang baik (*uswatun hasanah*) dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan kebersamaan dan kedamaian. Dengan *rapang*, nilai-nilai normatif yang terbukti ampuh dalam menduniakan semangat hormat menghormati dalam kehidupan masyarakat bisa terus menjelma dalam dunia modern sekarang ini.

c. *Bicara* (Undang-Undang)

Yang dimaksud dengan *bicara* dalam *pangadereng* adalah semua keadaan yang berkaitan dengan masalah peradilan, hukum

²⁰ *Ibid.*, h. 161.

acara peradilan, serta kadang-kadang juga mencakup musyawarah (*assipetangngareng*) dalam menetapkan hukum adat. Dengan demikian, *bicara* bisa diartikan sebagai aspek *pangadereng* yang mempersoalkan hak dan kewajiban tiap-tiap individu dalam interaksi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, La Tadamparek Puang ri Maggalatung dalam Lontarak Sukkuna Wajo menegaskan “*Tellomolomo urek bicarae ri abongori, nasaba tigerro’ku napettu. Narekko pettuiko bicara, tangngaki tutunna bicarae wali-wali, tutunna sabbinna wali-wali, enreng onro ri bolana wali-wali*” (Berbahaya kalau hakim tidak mengetahui peraturan hukum acara peradilan, sebab dapat memotong tenggorokan. Jikalau mengadili perkara, hendaknya keterangan kedua belah pihak yang berperkara didengar baik-baik, begitupula keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, serta keadaan rumah tangga mereka).²¹ Dengan adanya *bicara* dalam *pangadereng*, kehidupan sosial masyarakat menjadi lebih damai dan tentram karena ada aspek keadilan. Dimana segala keputusan diambil dengan tidak pandang dimensikeluarga dan kelompok.

Dalam kaitannya dengan upaya meretas kelompok mayoritas dan minoritas, nilai *bicara* perlu dipertegas fungsi dan wewenangnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa nilai *bicara* sudah mulai mengalami pengkerdilan fungsi dan wewenang. Keadilan sudah mulai dimanipulasi oleh berbagai kepentingan individu dan kelompok. Semakin pudarnya nilai *bicara* yang berimplikasi semakin hilangnya rasa keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat membuat jurang pemisah antara mayoritas dan minoritas semakin lebar.

d. *Warik* (Pelapisan Sosial)

Warik adalah salah satu unsur *pangadereng* yang menjalankan fungsi pembedaan (*mappallaisenge*). *Warik* bisa juga diartikan sebagai ketentuan tentang pelapisan sosial yang berfungsi mengatur

²¹ *Ibid.*, h. 164-166.

lorik (batas-batas) antara hak dan kewajiban individu-individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kaitannya dengan upaya meretas kelompok mayoritas dan minoritas, nilai *warik* bisa menjadi pedoman bagi setiap individu dan kelompok dalam mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan. Seseorang yang memahami nilai *warik* bisa bertindak secara bijak sehingga tindakan yang dilakukannya tidak akan merugikan diri sendiri dan masyarakatnya. Kelompok mayoritas akan bisa memahami dirinya yang memiliki potensi kuantitas yang dominan sehingga hendaknya mereka melindungi mereka yang minoritas, sementara kelompok minoritas yang memiliki jumlah yang relatif kecil bisa menghormati mereka yang mayoritas sehingga kehidupan yang saling asah, asih, dan asuh bisa terwujud.

e. Sarak

Sarak adalah unsur *pangadereng* yang diambil dari ajaran Islam untuk melengkapi empat unsur *pangadereng* sebelumnya yaitu *adek*, *rapang*, *bicara*, dan *warik*. Dalam kaitannya dengan pola interaksi *adek* dengan *sarak*. Datuk ri Bandang pernah membuat sebuah piagam yang disebut dengan piagam *sarak* yang berbunyi “*assiturusenna adek’e sarak’e, mappakarajai sarak’e ri adek’e, mappakalebbi’i adek’e ri sarak’e, temmakulle sirusak bicara, narekko pusai bicaranna adek’e, makkutanai ri bicaranna sarak’e, narekko pusai bicaranna sarak’e, makkutanai ri bicaranna adek’e, temmakullleni si apusang*” (persetujuan antara adat dan *sarak*, *sarak* menghormati adat, adat memuliakan *sarak*, adat dan *sarak* tidak saling membatalkan keputusan, kalau adat tidak dapat memutuskan suatu perkara, adat bertanya pada *sarak*, kalau *sarak* tidak dapat memutuskan suatu perkara, *sarak* bertanya pada adat, keduanya tidak akan keliru dalam keputusan)²² Di samping itu, Abu Hamid menggambarkan bahwa *sarak* adalah semua aturan yang berasal dari ajaran

²² Sewang, Ahmad A., *Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI sampai Abad XVII* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 145.

Islam, baik ajaran itu dalam bidang fiqh, ilmu kalam, maupun ajaran tasawuf dan akhlak. Bagi *pangadereng*, pola pandangan keislaman yang seperti itu dipandang masuk rumpun aturan-aturan *sarak*. *Sarak* memasuki tindakan dan keputusan *pangadereng* sekurang-kurangnya memberi pedoman dan nafas menurut ajaran Islam.²³

Dalam kaitannya dengan upaya meretas kelompok mayoritas dan minoritas, nilai *sarak* ini mengandung nilai-nilai normatif keagamaan yang begitu kental. Dalam masyarakat bugis, nilai *sarak* ini begitu kental mengingat orang bugis begitu fanatik dalam hal keagamaan. Bagi penulis, nilai *sarak* ini meskipun dalam masyarakat bugis sangat kental dengan nuansa keislaman, tapi pada hakikatnya semangat kebersamaan, gotong royong, tolong menolong, kasih mengasahi, hormat menghormati dan semacamnya telah menjadi nilai universal yang didengung-dengungkan oleh semua agama dan kepercayaan. Semangat keagamaan yang terkandung dalam nilai *sarak* ini tentunya akan sangat efisien dalam meretas mayoritas dan minoritas karena di dalamnya ada keterlibatan aspek keyakinan dengan segala konsekuensinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa adanya skala mayoritas dan minoritas dalam kehidupan umat manusia bukanlah hal yang seharusnya menjadi lahan subur tumbuhnya benih-benih konflik yang dipupuk oleh jiwa egosentris kelompok mayoritas ataupun jiwa apatis kelompok minoritas. Adanya skala mayoritas dan minoritas tersebut mestinya menjadi rahmat yang harus disyukuri oleh kelompok mayoritas dan minoritas untuk belajar bagaimana saling melindungi dan menghormati. Ibarat petuah orang bugis “*siliweng tessirapi*” tersirat bahwa tiap-tiap individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki potensi produktivitas yang berbeda-beda sehingga apabila disatukan maka akan menjadi modal

²³Abu Hamid, dalam *Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi di Indonesia*, Andi Rasdiyanah (ed.), (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1981), h. 81-82.

besar dalam membangun kehidupan yang lebih damai dan tentram. Semoga nilai universal yang terkandung dalam *paseng* (*lempu, getteng, ada tongeng, sipakatau sipakalebbi, dan mappesona ri dewata seuwwae* serta *pangadereng* (*adek, rapang, bicara, warik, dan sarak*) orang bugis bisa menjadi suatu perspektif alternatif dalam meretas mayoritas minoritas sebagai modal hidup bersama dalam bingkai NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, 1999, *Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang; Hasanuddin University Press.
- Davis, Kingsley, 1984, *Human Society*, New York: MacMillan Co.
- Hamid, Abu, 1981, dalam *Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi di Indonesia*, Andi Rasdiyanah (ed.), Ujung Pandang: IAIN Alauddin.
- Machmud, A. Hasan, t.th, *Silasa: Kumpulan Petuah Bugis Makassar*, ttp.: Bakti Centra Baru.
- Mattulada, 1995, *Latoa Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Cet. II; Ujung Pandang, Hasanuddin University Press
- O’dea, Thomas F., 1995, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada kerjasama dengan Yayasan Solidaritas Gajah Mada.
- Prasetyo, Ajie dan Nofrianus Barens, *Praktik Anti-Diskriminasi masih Jauh dari Kenyataan*, <http://berita.liputan6.com>.
- Parsons, Talcott, 1985, *Essays in Sociological Theory*, Glencoe: The Free Press.
- Rasdiyanah, Andi, 1995, *Integrasi Sistem Pangadereng (Adat) dengan Sistem Syariat sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa*, Disertasi; Yogyakarta: PPS IAIN Sunang Kalijaga.
- Sewang, Ahmad A., 2005, *Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI sampai Abad XVII*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wijaya, Albert Hendra, *Kejujuran*, <http://indonesia.siutao.com>.